

Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Penerapan 8 Fungsi Keluarga Gampong Meunasah Krueng

Hafidh Maulana^{1*}, Sri Wahyu Handayani¹

¹Universitas Teuku Umar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22 May 2024

Accepted 15 June 2024

Available online 30 June 2024

Kata Kunci:

Implementasi; PKK; Fungsi Keluarga

Keywords:

Implementation; PKK; Family Functions

ABSTRAK

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu program pemerintah dalam mensejahterakan keluarga. Untuk mencapai kesejahteraan keluarga diperlukan keefektifan dalam penerapan 8 fungsi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi program PKK dalam menerapkan 8 Fungsi keluarga di Gampong Meunasah Krueng sudah berjalan efektif atau belum. Terdapat 4 indikator penilaian yaitu dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi program PKK dalam penerapan 8 fungsi keluarga di Gampong Meunasah Krueng belum efektif dijalankan. Hal ini dikarenakan PKK terkait 8 fungsi keluarga belum disosialisasikan kepada masyarakat. Penyebab utamanya yaitu kurangnya sumber daya dan belum jelasnya struktur birokrasi PKK, sehingga program PKK hanya menjalankan 2 fungsi keluarga yaitu fungsi agama dan sosial budaya. Meskipun demikian sikap dan kemauan serta komunikasi yang ditunjukkan oleh PKK membuat program PKK di Gampong Meunasah Krueng masih aktif berjalan sampai sekarang. Oleh karena itu, penerapan 8 fungsi keluarga dalam PKK dianggap perlu diterapkan dalam masyarakat, jika program ini tidak diterapkan maka tidak terciptanya kesejahteraan keluarga dalam masyarakat tersebut.

ABSTRACT

The Family Welfare Empowerment Program (PKK) is one of the government's programs to improve family welfare. To achieve family prosperity requires effectiveness in implementing the 8 family functions. This research aims to find out whether the implementation of the PKK program in implementing the 8 Family Functions in Gampong Meunasah Krueng has been effective or not. There are 4 assessment indicators, namely in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out by observation and interviews with informants. The results of the research show that the implementation of the PKK program in implementing the 8 family functions in Gampong Meunasah Krueng has not been carried out effectively. This is because the PKK regarding the 8 family functions has not been socialized to the community. The main cause is the lack of resources and the unclear structure of the PKK bureaucracy, so that the PKK program only carries out 2 family functions, namely religious and socio-cultural functions. However, the attitude, willingness and communication shown by the PKK means that the PKK program in Gampong Meunasah Krueng is still actively running today. Therefore, it is deemed necessary to implement the 8 family functions in the PKK in society, if this program is not implemented then family prosperity will not be created in that society.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: hafidhmaulana242@gmail.com

1. Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki hak untuk menjalani hidup dan mendapatkan kesejahteraannya. Keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat menjadi bagian paling penting untuk disejahterakan. Keluarga yang sejahtera merupakan hal yang diimpikan setiap individu. Keluarga juga memiliki berbagai cara untuk mendefinisikan arti dari kesejahteraannya masing-masing. Hal ini seperti yang dikatakan oleh (Pasaribu et al., 2020) bahwa kesejahteraan adalah kondisi dimana setiap individu dalam menjalani kehidupannya mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan baik dari segi kebutuhan pokok maupun dari lingkungan sekitarnya. Maka bisa dikatakan bahwa dalam suatu keluarga bukan hanya tentang terjaminnya kebutuhan dalam rumah tangga, namun keharmonisan yang juga harus tertanam dalam menciptakan kerukunan keluarga.

Menanggapi hal demikian, maka pemahaman mengenai bagaimana fungsi yang sebenarnya dalam sebuah keluarga perlu dilakukan karena keluarga dianggap sebagai fondasi dan investasi awal dalam terbentuknya kehidupan sosial yang lebih efektif (Pasaribu et al., 2020). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 menyatakan bahwa ada Delapan fungsi keluarga yang terdiri dari fungsi-fungsi: (1) Keagamaan, (2) Sosial Budaya, (3) Cinta kasih (4) perlindungan, (5) Reproduksi, (6) Sosialisasi dan pendidikan, (7) Ekonomi, (8) Pembinaan Lingkungan. Sebuah keluarga akan kokoh jika ke delapan fungsi tersebut dapat diimplementasikan. Akan tetapi, jika terjadi kesinambungan antar fungsi tersebut akan mengakibatkan keruntuhan dan disharmoni yang tentunya memicu terjadinya konflik dalam masyarakat (Eny, 2020). Konflik yang terus menerus terjadi dapat menjadi sebab terhambatnya tujuan dari kesejahteraan itu sendiri.

Upaya dalam menghindari konflik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, pemerintah sebagai badan eksekutif tentunya harus berupaya meminimalisir masalah tersebut guna terciptanya keadaan yang kondusif di masyarakat terutama keluarga dimana saat ini pemerintah cenderung memfokuskan diri untuk mengutamakan pembangunan sumber daya manusia mengingat keterbatasan yang dimiliki Indonesia terhadap sumber daya manusia yang unggul. Hal ini yang membuat pemerintah berupaya terus melakukan terobosan dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan guna mensejahterakan masyarakat melalui sokongan dana ke daerah-daerah sebagai bentuk Desentralisasi dalam menciptakan kemandirian. Secara esensi kemandirian haruslah dimulai dari paling bawah yaitu Desa atau Gampong.

Desa merupakan daerah paling kecil atau paling bawah dalam tata pemerintahan. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional yang berkedudukan di daerah Kabupaten (Daldjoelani, 2018). Desa dijadikan sebagai ujung tombak pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat. Salah satu program yang sedang digerakkan pemerintah saat ini dalam upaya kesejahteraan masyarakat yaitu Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK).

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) adalah suatu gerakan dari pemerintah dengan melibatkan perempuan sebagai motor penggerak dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat yang tumbuh dari bawah yaitu keluarga (Antika & Isnaini, 2022). PKK sendiri merupakan organisasi yang tumbuh dari bawah yaitu Desa dalam upaya pembangunan dan pertumbuhan desa, selain itu PKK juga bermaksud membentuk dan membina keluarga guna terwujudnya keluarga yang sejahtera dimana perempuan sebagai penggerak (Joan F Rantang, 2016). Dalam lingkungan keluarga terbentuknya generasi-generasi muda yang berkarakter tidak terlepas dari peran seorang perempuan yang menjadi ibu dari anak-anaknya, perempuan menjadi garda terdepan dan berperan penting dalam setiap lini kehidupan manusia (Aisyatin Kamila, 2020). Pemberdayaan perempuan diharuskan dapat memberi pengetahuan pendidikan dan ruang pekerjaan sehingga terwujudnya kemandirian perempuan untuk menunjang perekonomian masyarakat, hal ini dapat disokong dengan memberikan motivasi, pembekalan dan pelatihan kewirausahaan dalam upaya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa perempuan dianggap mampu mengemban tugas sebagai pelaksana Program PKK. Program PKK dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu oleh kaum perempuan terutama ibu-ibu khususnya di desa melalui

POKJA (Kelompok kerja) tertentu yang dibagi menjadi 4 pokja dengan berlandaskan 10 program utama PKK. Adapun sepuluh Program utama tersebut meliputi: (1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; (2) gotong royong; (3) pangan; (4) sandang; (5) perumahan dan tata laksana rumah tangga; (6) pendidikan dan ketrampilan; (7) kesehatan; (8) pengembangan kehidupan berkeoperasian; (9) kelestarian lingkungan hidup dan (10) perencanaan sehat. Organisasi PKK sendiri menjalankan programnya dimulai dari daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai kelompok-kelompok PKK atau Dasawisa, PKK juga merupakan bagian integral dari kegiatan PKK tingkat Nasional. Dalam merumuskan kebijakan, PKK merancang suatu peraturan atau kebijakan dimulai dari perencanaan yang dilakukan dari tingkat paling bawah dan bersifat kondisional dengan tetap melihat keadaan dan kebutuhan yang menjadi prioritas dari daerah tersebut dan tetap menjaga hubungan yang konsultatif dan koordinatif (Goleman et al., 2019).

Organisasi PKK merupakan organisasi swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat dimana pemerintah membantu dengan memberikan suntikan dana sebagai pendorong agar berkembangnya partisipasi masyarakat dalam menggerakkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga bisa terpenuhi jika organisasi PKK menjalankan programnya sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan. Organisasi PKK juga tentunya harus menyelaraskan programnya dengan tetap menjalankan delapan fungsi keluarga, hal ini dimaksud karena 10 program yang dilakukan oleh PKK sendiri memiliki kesesuaian dengan 8 fungsi keluarga. Terlebih lagi jika ditinjau dari tujuan PKK itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan keluarga, maka keluarga akan dapat dikatakan sejahtera apabila PKK bisa mengimplementasikan 8 fungsi keluarga dengan baik untuk masyarakat.

Implementasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang telah direncanakan terlebih dahulu dalam mencapai suatu tujuan. Jika dikaitkan dengan kebijakan, implementasi kebijakan merupakan suatu hal atau cara yang dilakukan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam waktu tertentu (Anggraeni, 2019). Dalam proses implementasi kebijakan ada dua pilihan langkah yang ditawarkan baik secara langsung melalui program-program yang dibentuk maupun dalam bentuk formulasi kebijakan turunan dari kebijakan tersebut. Program PKK ini merupakan langkah dari implementasi kebijakan publik secara langsung dari pemerintah melalui kaum perempuan dalam mensejahterakan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Pada penelitian ini penulis mencoba melihat bagaimana implementasi program PKK dalam menerapkan Delapan fungsi keluarga di Gampong Meunasah Krueng.

Berdasarkan hasil observasi awal, Gampong Meunasah Krueng merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah penduduk berkisar 662 jiwa dengan rasio jumlah penduduk untuk laki-laki berjumlah 232 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 430 jiwa. Di gampong ini terdapat juga organisasi PKK yang diketuai oleh istri kepala desa atau kechik daerah setempat. Dalam observasi awal penulis menemukan bahwa program PKK di Gampong Meunasah Krueng sudah berjalan dengan semestinya, Namun masih ada beberapa kendala yang menghambat jalannya organisasi tersebut. PKK di gampong Meunasah Krueng digerakkan oleh ibu-ibu di Desa Setempat melalui 4 Pokja dengan berlandaskan 10 program utama PKK. Dalam pengimplementasiannya, program PKK tidak semuanya berjalan dengan lancar untuk kesejahteraan keluarga, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas serta kekurangan dana yang diberikan oleh pemerintah membuat PKK di Gampong ini belum terealisasi dengan sempurna. PKK hanya aktif dalam bidang keagamaan dan sosial budaya saja, sedangkan dalam bidang ekonomi masih belum efektif dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kegiatan serta sarana yang menguntungkan bagi perempuan terutama masyarakat dalam menunjang kesejahteraan keluarga. Begitu juga dengan bidang-bidang lainnya yang masih belum terimplementasi dengan baik dalam penerapan 8 fungsi.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PKK telah dilakukan oleh (Antika & Isnaini, 2022). Penelitiannya berjudul *"Implementasi PKK di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan"*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kelurahan

Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam proses komunikasi, dimana para kader PKK selalu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat di Kelurahan Lebung Gajah agar mengetahui pentingnya program PKK ini. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Goleman et al., 2019). Penelitian tersebut berjudul *"Implementasi Program Kerja Pkk (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah"*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi program kerja PKK dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman melalui program UPPK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) pelaksanaan program kerja pemberdayaan ekonomi sudah berjalan dengan baik, pelaksanaannya yaitu pelatihan kewirausahaan, peminjaman modal usaha, dan pengembangan usaha produktif rumah tangga. Ibu rumah tangga mengalami perubahan dengan dapat menggali kemampuan yang mereka miliki, meningkatnya taraf hidup serta ibu rumah tangga dapat mandiri dengan mengembangkan usahanya dan dapat menghasilkan pendapatan ekonomi rumah tangga. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Devfa & Mardhiah, 2022) dengan judul *"Implementasi Program Pkk Bidang Pemberdayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Lancong"*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi sudah tercapai akan tetapi belum terlaksana secara maksimal dimana sosialisasi belum dilaksanakan bagi masyarakat Lancong dalam bidang pemberdayaan pendidikan. Pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pendidikan masih minim, masyarakat lancong lebih memilih untuk bekerja di usia muda dan tidak ingin melakukan pendidikan karena menurut mereka pendidikan belum menjamin kehidupan masyarakat sementara bekerja sebagai petani dan penggali emas sudah pasti menjamin kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini belum berjalan secara efektif dan efisien.

Ketiga penelitian tersebut membahas tentang bagaimana Implementasi Program PKK dalam mensejahterakan masyarakat terutama untuk keluarga sudah terlaksana dengan baik atau belum. Namun ketiganya belum menyinggung tentang implementasi program PKK dalam penerapan 8 fungsi keluarga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini lebih menekankan pada implementasi program PKK dalam penerapan 8 fungsi keluarga di gampong Meunasah krueng. Penerapan 8 fungsi keluarga tersebut memerlukan berbagai aspek dan upaya dalam mencapai kesejahteraan atau tujuan dari PKK itu sendiri. Menurut Hamdi dalam (Apriandi, 2017) Implementasi kebijakan itu sendiri memerlukan usaha atau ikhtiar oleh implementor agar dalam pelaksanaannya dapat memperoleh tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Kemudian untuk melihat dan mengetahui bagaimana implementasi program PKK dalam penerapan 8 fungsi keluarga Gampong Meunasah Krueng, maka penelitian ini menggunakan model Implementasi menurut Edwadr III dalam (Tachjan, 2006) yang menyatakan bahwa ada 4 tolak ukur agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu: 1) Komunikasi; 2) Sumber Daya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur Birokrasi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang merupakan rancangan dari penelitian yang dilakukan dibanyak bidang salah satunya di evaluasi, peneliti melihat lebih mendalam pada satu kasus berupa peristiwa dan proses antara satu individu atau lebih (Creswell, 2016). Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Sumber data yaitu data sekunder dan data primer, menggunakan teknik purposive sampling yakni pengambilan sampel secara terpilih dengan jumlah informan yang terpilih ada enam diantaranya informan 1 Kechik Gampong Meunasah Krueng, informan ke II Bendahara Gampong, Informan ke III Ketua PKK, Informan ke IV Ketua II PKK, Informan ke V Sekretaris PKK, dan Informan ke VI Perempuan atau Masyarakat setempat.

Lokasi penelitian yang dilakukan berada di Gampong Meunasah Krueng, Kec. Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat bahwa Program PKK yang ada di Gampong Meunasah Krueng masih belum efektif dijalankan, kurangnya pemahaman terkait program kerja PKK oleh pengurus PKK, belum terarahnya struktur dan fungsi Pengurus PKK serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Selain itu, anggota PKK sendiri masih

belum faham terkait 8 fungsi keluarga dan belum efektif menjalankan program kerja yang dapat menerapkan 8 fungsi keluarga kepada masyarakat, sehingga dalam hal ini peneliti perlu untuk mencari data dan fakta dari permasalahan yang terjadi di Gampong Meunasah Krueng untuk di analisis berdasarkan data.

3. Hasil dan pembahasan

Pemerintah Indonesia berupaya dalam membuat program-program yang mendorong kegiatan-kegiatan untuk swasta dan masyarakat. Program yang dibuat untuk masyarakat akan berjalan efektif jika adanya intervensi dari pemerintah dengan menyediakan biaya, barang atau jasa (Mustari, 2015). Menurut Soewarno Handayani dalam (Aristin et al., 2018) mengatakan bahwa Suatu program dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif apabila tujuan telah tercapai dan berjalan lancar. Salah satu program yang didorong pemerintah saat ini adalah program Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang bertempat di Gampong Meunasah Krueng, dalam hal ini berguna dalam pengaplikasian 8 fungsi keluarga untuk kesejahteraan masyarakat.

Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen yang berperan penting dalam tercapainya suatu implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan, unsur komunikasi diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan suatu kebijakan (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022). Oleh karena itu, peran komunikasi sangat diperlukan untuk menentukan keefektifan dari implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Jamarnusi selaku ketua PKK menuturkan:

“ Dalam kegiatan-kegiatan PKK yang telah dilaksanakan, komunikasi antara pengurus PKK sesama pengurus PKK dan pemerintah desa dengan pengurus PKK masih berjalan normal, komunikasi berjalan harmonis, ibu-ibu PKK melakukan komunikasi secara terbuka melalui rapat tim untuk mencari solusi. Begitu juga dari pemerintah desa juga ikut membantu memberikan motivasi serta saran melalui sosialisasi kepada pengurus PKK, namun program PKK masih belum melakukan sosialisasi terkait 8 fungsi keluarga secara langsung kepada masyarakat“ (Wawancara Sabtu, 17 September 2022).

Berdasarkan data wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam sektor komunikasi antara pengurus PKK sesama pengurus PKK, antara Pemerintah desa dengan Pengurus PKK dan antara Pengurus PKK dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan harmonis. Hal ini terbukti bahwa komunikasi dijalankan melalui komunikasi yang ramah dan sopan santun kepada masyarakat. Dalam penerapan fungsi keluarga, PKK belum mensosialisasikan terkait 8 fungsi keluarga secara langsung kepada masyarakat, PKK hanya menjalankan 2 program dalam bidang agama dan sosial budaya yang mana kedua bidang tersebut merupakan manifestasi dari 2 fungsi keluarga yaitu fungsi agama dan sosial budaya. Selain itu pengurus PKK juga berkomunikasi dengan asas keterbukaan dengan cara bertatap muka secara langsung baik dilakukan dengan rapat anggota maupun sosialisasi dan pemberian motivasi serta saran terkait program PKK oleh pemerintah desa. Komunikasi dapat berjalan dengan baik jika dilakukan dengan terbuka, yaitu dengan menyampaikan informasi, ide, gagasan tanpa adanya rasa takut dalam mencapai kesepakatan bersama (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022). Dalam rapat tim dan pelaksanaan program pengurus PKK berkomunikasi dengan baik dan saling keterbukaan satu sama lain.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan indikator yang sangat penting bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Keberhasilan proses implementasi sangat bertumpu pada kemampuan para pemangku kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Khasanah et al., 2018). Menurut Edward III dalam (Aristin et al., 2018) Sumber daya

merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber daya Peralatan dan Sumber Daya Kewenangan.

Sumber daya manusia

Implementasi Kebijakan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia yang tersedia. Sumber Daya Manusia yang kompeten menentukan berjalannya Implementasi kebijakan terkait program PKK di Gampong Meunasah Krueng dalam penerapan 8 fungsi keluarga. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Fadliani selaku Ketua II PKK mengungkapkan bahwa:

“ Pengurus PKK terbentuk dengan beranggotakan 10 orang dimana diketuai langsung oleh Istri Keuchik, dalam pelaksanaannya, ketua maupun Anggota PKK masih kurang memahami tentang 10 program utama PKK dan 8 fungsi keluarga , PKK hanya menjalankan dua bidang saja yaitu bidang Agama dan Sosial Budaya, sedangkan bidang-bidang lainnya masih belum efektif dijalankan, hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah.” (Wawancara Sabtu, 17 September 2022).

Berdasarkan data wawancara dapat disimpulkan bahwa Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh PKK di Gampong Meunasah Krueng masih belum kompeten dan produktif. Dalam pengaplikasian 8 fungsi keluarga, PKK sendiri hanya aktif menjalankan 2 bidang dari 10 Program Utama PKK yaitu bidang agama dan sosial budaya, sedangkan bidang-bidang lainnya belum efektif dijalankan. Padahal 10 program utama PKK tersebut adalah tolak ukur dalam penerapan 8 fungsi keluarga. Selain itu Kurangnya pemahaman serta pelatihan khusus yang diberikan pemerintah kabupaten mengenai tugas dan tujuan dari program PKK itu sendiri membuat penerapan 8 fungsi keluarga di Gampong Meunasah Krueng melalui pengurus PKK belum optimal diimplementasikan.

Sumber daya anggaran

Sumber daya Anggaran merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Terbatasnya sumber daya anggaran yang tersedia membuat suatu pelayanan terhadap masyarakat akan terganggu. Berdasarkan Wawancara bersama Agus selaku Bendahara Gampong Meunasah Krueng mengungkapkan bahwa:

“ Anggaran yang dikucurkan untuk program PKK di Gampong Meunasah Krueng berasal dari dana prioritas sebesar 32% dalam Dana Desa (DD), dalam Dana Desa tersebut, program PKK diberikan tunjangan insentif sebesar Rp. 5.000.000 dan Rp. 1.500.000 untuk keperluan baju seragam PKK dalam waktu satu tahun. Namun dalam pelaksanaannya, dana sisa untuk keperluan baju dipakai untuk keperluan operasional pemuda dikarenakan anggaran mengenai baju sudah digabungkan dengan dana insentif PKK dan pengalihan anggaran ini juga disebabkan karena kegiatan pemuda merupakan program prioritas di Gampong Meunasah Krueng” (Wawancara Sabtu, 17 September 2022).

Berdasarkan data wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam sumber daya anggaran PKK di Gampong Meunasah Krueng masih belum memadai, anggaran yang diterima oleh PKK belum terwadahi dikarenakan adanya pengalihan anggaran PKK ke anggaran operasional pemuda yang dilakukan oleh pemerintah gampong mengingat kegiatan pemuda merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak anggaran dan menjadi program prioritas di Gampong tersebut untuk keperluan operasional dan program PKK dalam menerapkan 8 fungsi keluarga.

Sumber daya peralatan

Sumber Daya Peralatan mencakup sarana dan prasarana yang menjadi penunjang setiap kegiatan dalam mencapai keberhasilan suatu program. Berdasarkan hasil wawancara bersama Fadliani selaku Ketua II PKK menyebutkan bahwa:

“Program PKK masih belum lengkap dalam segi sarana dan prasarananya, sekretariat masih belum ada dan bahan penunjang lain juga masih belum lengkap, yang sudah tersedia hanyalah kebutuhan PKK seperti peralatan dapur, pelaminan dan lainnya yang tentunya berguna untuk acara kenduri atau hajatan dan acara sosial budaya lainnya.” (Wawancara Sabtu, 17 September 2022).

Berdasarkan data wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam segi sumber daya peralatan PKK di gampong Meunasah Krueng masih kurang memadai. Peralatan PKK hanya tersedia untuk keperluan kegiatan Sosial Budaya. Sedangkan untuk keperluan lainnya sesuai 10 program utama PKK masih belum ada. Hal ini yang menyebabkan fungsi PKK untuk kesejahteraan keluarga melalui penerapan 8 fungsi keluarga belum sepenuhnya berjalan.

Sumber daya kewenangan

Sumber daya Kewenangan juga merupakan faktor penentu keberhasilan dalam suatu Implementasi kebijakan. Kewenangan tersendiri memberikan peluang untuk pelaku kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan yang berguna dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara bersama Jamarnusi selaku ketua PKK Gampong Meunasah Krueng mengatakan:

“Dalam menyelesaikan sebuah masalah, pengurus PKK menyelesaikannya dengan musyawarah dan mufakat, dalam proses pengambilan keputusan ketua PKK melaksanakannya tanpa ada tekanan dan intervensi dari pihak yang tidak berwenang.” (Wawancara Sabtu, 17 September 2022).

Berdasarkan data wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam segi Sumber daya Kewenangan, para pelaku kebijakan seperti Ketua PKK menjalankan kewenangannya secara efektif tanpa adanya keraguan maupun tekanan dari pihak luar Organisasi.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Dalam mencapai keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan, Disposisi juga memegang peranan penting selain Komunikasi dan Sumber Daya. Menurut Edward III dalam (Khasanah et al., 2018) Disposisi atau Sikap Pelaksana merupakan pendekatan dimana para pelaku kebijakan dituntut harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan suatu kebijakan agar tidak terjadinya bias dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fariani selaku Masyarakat Gampong Meunasah Krueng mengatakan:

“Program PKK dalam pelaksanaannya sudah efektif, hal itu ditunjukkan dengan sikap kerja sama dan sopan santun yang mereka tunjukkan dengan terjun langsung dengan masyarakat khususnya dalam menerapkan 8 fungsi keluarga. Akan tetapi pemahaman serta kemampuan yang kompeten dari pengurus PKK masih belum sepenuhnya memahami tentang Program PKK dan 8 fungsi keluarga begitu juga dengan ketua umum PKK yaitu istri Keuchik yang masih kurang mampu dalam memahami program-program PKK secara terstruktur.” (Wawancara Sabtu, 17 September 2022).

Berdasarkan data wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam indikator Disposisi atau sikap Pelaksana yang ditunjukkan oleh Anggota PKK Gampong Meunasah Krueng dalam sektor sikap dan kemauan sudah berjalan efektif, akan tetapi dalam sektor pemahaman program masih belum efektif yang ditunjukkan ketidakfahaman dalam memahami program PKK sehingga dalam penerapan 8 fungsi keluarga kepada masyarakat menjadi terhambat.

Struktur Birokrasi

Menurut Subekti dalam (Vanocy et al., 2022) Struktur Birokrasi merupakan unsur terpenting dalam keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan, jika Struktur Birokrasi tidak tertata dan terjal dengan baik maka Implementasi Kebijakan akan terhambat. Menurut Edward III dalam (Maulidia, 2018) ada 2 karakteristik utama dari struktur Birokrasi adalah Standar Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi.

Standar operating procedures (SOP)

Menurut Atmoko dalam (Sulistiani, 2016) Standar Operating Procedures (SOP) adalah panduan atau acuan yang menggambarkan langkah-langkah kerja yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadliani selaku ketua II PKK mengungkapkan:

“panduan yang digunakan dalam program PKK di Gampong Meunasah Krueng sebenarnya sudah ada namun dikarenakan tidak adanya fasilitas atau sarana yang mendukung untuk diperlihatkan kepada publik sehingga panduan tersebut sekarang sudah terbengkalai dan banyak dari masyarakat bahkan anggota PKK sendiri tidak mengetahui program utama PKK dan 8 fungsi keluarga tentunya.” (Wawancara Sabtu, 17 September 2022).

Standar Operasional Procedure (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah untuk program PKK masih belum dapat dimanfaatkan secara efektif oleh ibu-ibu PKK, hal ini yang menjadi masalah dalam penerapan 8 fungsi keluarga. Kurangnya petunjuk serta informasi mengenai tugas dan tujuan dari PKK itu sendiri membuat pengurus PKK di gampong Meunasah Krueng kesulitan dalam menerapkan 8 fungsi keluarga melalui 10 program PKK.

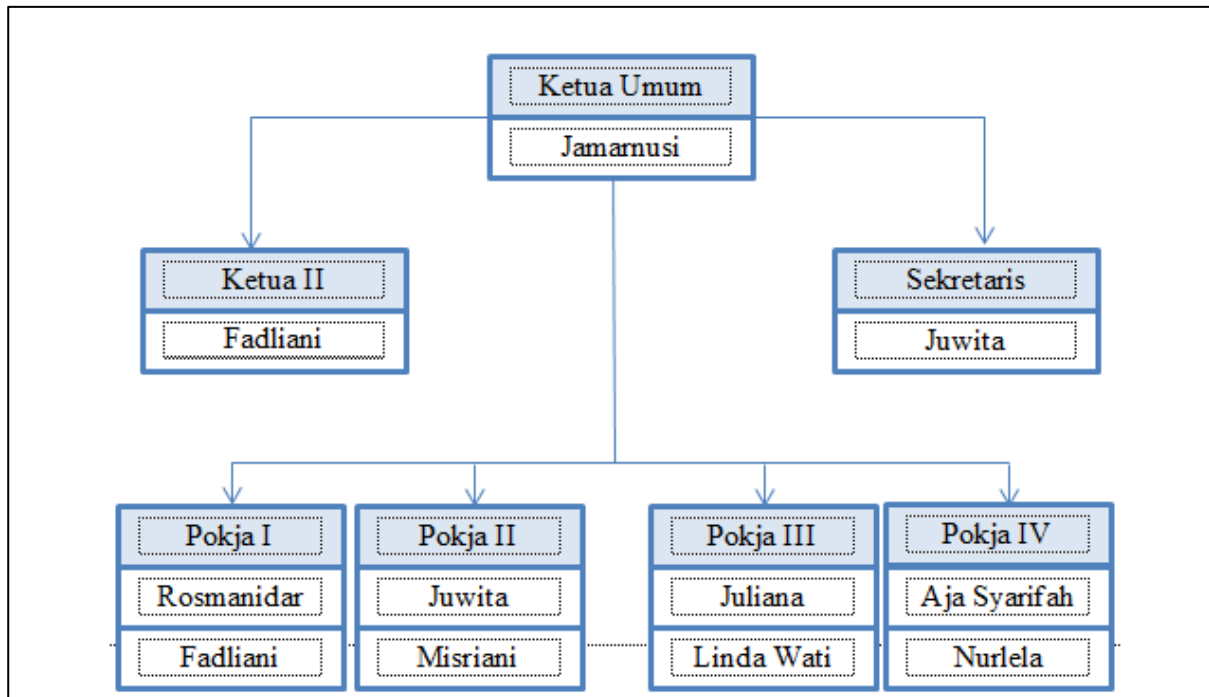
Fragmentasi

Menurut Edward III dalam (Maulidia, 2018) Fragmentasi adalah pemberian tugas dan tanggung jawab oleh pelaku kebijakan kepada pelaksana dalam sebuah organisasi dalam ruang lingkup kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadliani selaku ketua II PKK menuturkan:

“Dalam pembagian tugas dan struktur organisasi PKK belum dilakukan secara efektif, PKK sendiri padahal memiliki 4 Kelompok Kerja (Pokja) sesuai 10 program utama PKK, namun pokja-pokja tersebut sekarang sudah vakum, untuk sekarang tugas yang masih aktif dijalankan hanyalah dalam pengadaan alat dan bahan dirumah kenduri dan kegiatan keagamaan. semua pengurus PKK digabungkan tugasnya dan saling menutupi satu sama lain.” (wawancara Sabtu, 17 September 2022).

Berdasarkan data wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam segi pembagian tugas serta struktur birokrasi masih belum jelas dan efektif diterapkan. Walaupun strukturnya sudah ada namun dalam implementasi pembagian tugas dan program masih belum efektif diterapkan. berikut adalah struktur kepengurusan PKK dan pembagian pokja-pokja PKK di Gampong Meunasah Krueng.

Berdasarkan Bagan Struktur Pengurus PKK gampong Meunasah Krueng pada Gambar 1, terlihat masih belum lengkap dan terstruktur dengan efektif. struktur dan pokja-pokja yang sudah dibentuk tidak terarah dalam pelaksanaan tugas. Pengurus PKK yang telah tergabung dalam struktur kepengurusan masih belum faham terkait tugas dan wewenang yang mereka miliki, berkaitan dengan keterkaitannya dengan 8 fungsi keluarga. Pengurus PKK masih belum menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang ada dalam 10 program PKK untuk diterapkan. Pokja PKK yang sudah terbentuk hanya mampu menjalankan 2 fungsi dari 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi agama dan sosial budaya sedangkan 6 fungsi lainnya masih belum diterapkan dengan baik oleh pokja-pokja PKK.



Gambar 1. Struktur Kepengurusan PKK Gampong Meunasah Krueng Tahun 2022 (Hasil Olahan Penulis)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Antika & Isnaini, 2022) implementasi program PKK di Kelurahan Lebung Gajah sudah terlaksana dengan lancar hanya saja kurang efektif disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program PKK, hal ini terjadi dikarenakan intervensi masyarakat tentang program PKK yang masih rendah. Sementara dalam penelitian ini implementasi program PKK masih belum berjalan secara efektif dan efisien, namun sikap dan kemauan serta komunikasi yang dilakukan oleh pengurus PKK sudah berjalan dengan baik sampai saat ini.

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Implementasi program Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam penerapan 8 fungsi keluarga di Gampong Meunasah Krueng berdasarkan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan secara efektif dan efisien. Dimana program PKK hanya menjalankan 2 fungsi keluarga yaitu fungsi agama dan fungsi sosial budaya yang dilakukan melalui partisipasi pengurus PKK dalam kegiatan kenduri atau hajatan dan kegiatan yasinan. Hal ini disebabkan karena pengurus PKK masih belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait 8 fungsi keluarga, kurangnya sumber daya, dan masih belum jelasnya SOP serta struktur kepengurusan PKK di Gampong Meunasah Krueng. Meskipun demikian sikap dan kemauan serta komunikasi yang dilakukan oleh pengurus PKK sudah berjalan dengan baik sampai saat ini. Berikut saran yang dapat diberikan peneliti terkait implementasi program PKK dalam penerapan 8 fungsi keluarga di Gampong Meunasah Krueng yaitu: (1) Dalam penerapan 8 fungsi keluarga, Pengurus PKK dituntut untuk memahami dengan baik mengenai program PKK, (2) Pemerintah diharuskan mendorong kegiatan PKK melalui pelatihan dan suntikan dana yang memadai demi keberlangsungan program PKK dalam menerapkan 8 fungsi keluarga, (3) Perlu adanya sosialisasi dan informasi mengenai 8 fungsi keluarga oleh PKK demi kesejahteraan masyarakat terutama keluarga. PKK harus benar-benar menjadi penggerak dalam upaya kesejahteraan masyarakat terutama perempuan dengan menjalankan sepuluh program utama PKK sehingga ke delapan fungsi keluarga dapat terimplementasikan dengan baik.

Daftar Rujukan

- Aisyatin, K. (2020). Peran Perempuan Sebagai Garda Terdepan Dalam Keluarga Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 1(2), 75–83. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v1i2.21>.
- Anggraeni, I. (2019). Pengertian Implementasi dan PendapaT Ahli. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 16–36.
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>.
- Antika, R., & Isnaini, M. A. (2022). Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota *Al-Basyar*, 1(01), 1–10. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Al-Basyar/article/view/13091%0Ahttp://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Al-Basyar/article/download/13091/4868>
- Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. *Implementasi Kebijakan; Sosialisasi; Kepatuhan Masyarakat*, 11–35.
- Aristin, R., Azizah, N., Studi, P., Administrasi, I., Madura, U., Raya, J., & Km, P. (2018). Desa Kaduara Timur Sumenep Madura. *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sebilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura*, 8, 120–130.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran Edisi ke-4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daldjoelani, N. (2018). *Interaksi Desa-Kota*. 4(1), 6.
- Devfa, S., & Mardhiah, N. (2022). Implementasi Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Lancong. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 77–87. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.43533>.
- Eny, S. (2020). Fungsi Keluarga, Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Proses Pendidikan (Tinjauan Sosiologis). *Islamika*, 11(1), 14–31. <https://core.ac.uk/download/pdf/287361647.pdf>.
- Goleman et al., 2019. (2019). Implementansi Program Kerja PKK Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Joan F Rantang, J. M. dan V. Y. L. (2016). Peranan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Administrasi*, 3(1), 198.
- Khasanah, N., Sukarno, R., Yustira, O., Fitriyani, N., Pramesti, T. I., Maolana, H., & Haikal, R. (2018). *Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program*. 02(02), 30–35.
- Maulidia, F. M. (2018). Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 6(2), 183–192. <https://doi.org/10.33475/jikmh.v6i2.37>.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Pasaribu, V. L. D., Agrasadya, Nina Shabrina, & Krisnaldy. (2020). Abdi abdi laksana. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 177–180.
- Sulistiani, A. S. (2016). Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sambutan. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 53-63.
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan Publik*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Vanocy, D. S., Achmad, S., & Rafiie, K. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Informasi Data Korporasi Jasa Raharja (DASI-JR) Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja*.